

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan domestik dan kebutuhan non-domestik. Air minum merupakan salah satu infrastruktur perkotaan yang mempunyai dampak besar terhadap pembangunan perkotaan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan sarana dan prasarana akan semakin meningkat. Pemenuhan kebutuhan air minum untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang masih terkendala pada keterbatasan pelayanan infrastruktur perlu dilakukan. Oleh karena itu, penyediaan air sangat penting bagi kelancaran aktivitas masyarakat dan perlu dilakukan peningkatan kebutuhan terhadap fasilitas air minum yang layak secara berkelanjutan baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat itu sendiri.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk terus melanjutkan capaian target menuju 100% akses air minum dan saat ini pemerintah dihadapkan pada target pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih yang berkelanjutan untuk semua. Berdasarkan peningkatan jumlah kebutuhan ketersediaan air bersih, pemerintah berupaya untuk mengatasi masalah ketersediaan air bersih dan penurunan derajat kesehatan masyarakat akibat sanitasi yang buruk di pedesaan, yaitu melalui program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kesehatan.

Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan salah satu program nasional (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Program PAMSIMAS dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif dan partisipasi masyarakat.

Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) telah menjadi salah satu program andalan nasional oleh pemerintah dan pemerintah daerah. PAMSIMAS I yang dimulai pada tahun 2008 – 2012 dan PAMSIMAS II pada tahun 2013 – 2015 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin pedesaan dan pinggiran kota untuk mendapatkan akses pelayanan air minum serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk terus meningkatkan akses penduduk pedesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dalam rangka pencapaian target menuju Indonesia akses 100% air minum dan target SDGs, PAMSIMAS dilanjutkan pada tahun 2016 – 2022 dan pada tahun 2023 PAMSIMAS dilanjutkan pelaksanaannya sebagai kegiatan untuk mendukung capaian air minum layak dan aman untuk seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2024.

Sasaran dari program PAMSIMAS, yaitu penambahan jumlah orang yang mempunyai akses terhadap fasilitas air minum yang layak secara berkelanjutan, penambahan jumlah sambungan rumah (SR) untuk layanan air minum layak, dan penambahan jumlah Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum (KPSPAM) yang dibentuk untuk mengelola sarana air minum terbangun. Adapun kriteria untuk dilakukannya program PAMSIMAS pada wilayah pedesaan atau pinggiran kota, yaitu cakupan akses air minum layak masyarakat desa/kelurahan belum mencapai 100%, lokasi yang akan menerima program PAMSIMAS tidak termasuk dalam wilayah layanan air minum dari Perumda/PDAM/UPTD, terdapat penduduk atau masyarakat yang menjadi target penerima manfaat SPAM dan potensi sambungan rumah, dan memiliki ketersediaan sumber air atau SPAM eksisting yang dapat dikembangkan.

Berdasarkan uraian diatas, sasaran dan kriteria program PAMSIMAS menitik beratkan pada potensi agar SPAM yang direncanakan dapat dikembangkan dan daerah layanan dapat diperluas di masa depan. Hal ini menjadikan kebutuhan air minum akan semakin bertambah jika daerah pelayanan terhadap akses air minum yang layak diperluas. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap ketersediaan air minum pada kondisi eksisting agar dapat melayani dan memenuhi kebutuhan air minum jangka panjang, yaitu diperlukan evaluasi terhadap debit air akan terpenuhi atau tidak terpenuhi untuk didistribusikan kepada masyarakat dalam

jangka panjang dan memberikan rekomendasi terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM).

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dalam pelaksanaan kegiatan magang ini, yaitu:

1. Menganalisis dan mengevaluasi kondisi eksisting dan perluasan wilayah perencanaan sistem distribusi air minum di Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
2. Memberikan rekomendasi terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

1.3 Ruang Lingkup

Adapaun ruang lingkup pelaksanaan kegiatan magang ini, yaitu:

1. Magang MBKM dilaksanakan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur.
2. Magang MBKM dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu sejak 1 Februari 2024 – 31 Mei 2024.
3. Menganalisis kebutuhan debit air pada perluasan wilayah perencanaan sistem distribusi air minum di wilayah eksisting.
4. Menganalisis kapasitas dan dimensi reservoir pada perencanaan sistem penyediaan air minum di Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

1.4 Profil Instansi



Gambar 1. 1 Logo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

(Sumber : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 16 Tahun 2020, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) mempunyai tugas untuk melaksanakan perencanaan dan penyiapan teknis, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman, pengelolaan informasi pelaksanaan pembangunan permukiman, penanggulangan pasca bencana dan fasilitasi serah terima aset di wilayah Jawa Timur. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran pembangunan sarana dan prasarana permukiman
2. Penyiapan analisis teknis dan evaluasi terhadap kelayakan program pembangunan sarana dan prasarana permukiman
3. Pelaksanaan, pengendalian teknis, dan pengawasan pembangunan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasarana strategis.
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan pemeliharaan aset pembangunan sarana dan prasarana permukiman sampai dengan serah terima aset
5. Fasilitasi penyampaian usulan daerah dan koordinasi pemangku kepentingan bidang pembangunan sarana dan prasarana permukiman;
6. Fasilitasi pengadaan lahan dan serah terima aset;
7. Fasilitasi pengelolaan rumah negara;
8. Pengelolaan tanggap darurat dan pelaksanaan dukungan penanggulangan pasca bencana serta kerusuhan sosial
9. Pemberdayaan masyarakat bidang pembangunan sarana dan prasarana permukiman;
10. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi;

11. Pengelolaan sistem informasi bidang pembangunan sarana dan prasarana permukiman; dan
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

1.4.1 Visi dan Misi

Adapun visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2020-2024, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif, dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2020-2024, yaitu :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, permukiman, dan perumahan dalam suatu pembangunan wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.4.3 Sejarah Singkat Instansi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kementerian PUPR) merupakan Kementerian Pemerintah Indonesia yang membidangi masalah pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dimulai pada tahun 1999-2000 dengan nama “Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah”

dan berganti nama menjadi “Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah” pada tahun 2000-2004.

Istilah “Pekerjaan Umum” adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda “Openbare Werken” yang pada zaman Hindia Belanda disebut “Waterstaat swerken”. Setelah Indonesia memproklamkan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka semenjak itu Pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan Pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun Pemerintahan Daerah-daerah. Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang pertama, maka pada Menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pada Tahun 1945, Pekerjaan Umum berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung V.&W. (dikenal dengan nama “Gedung Sate”).

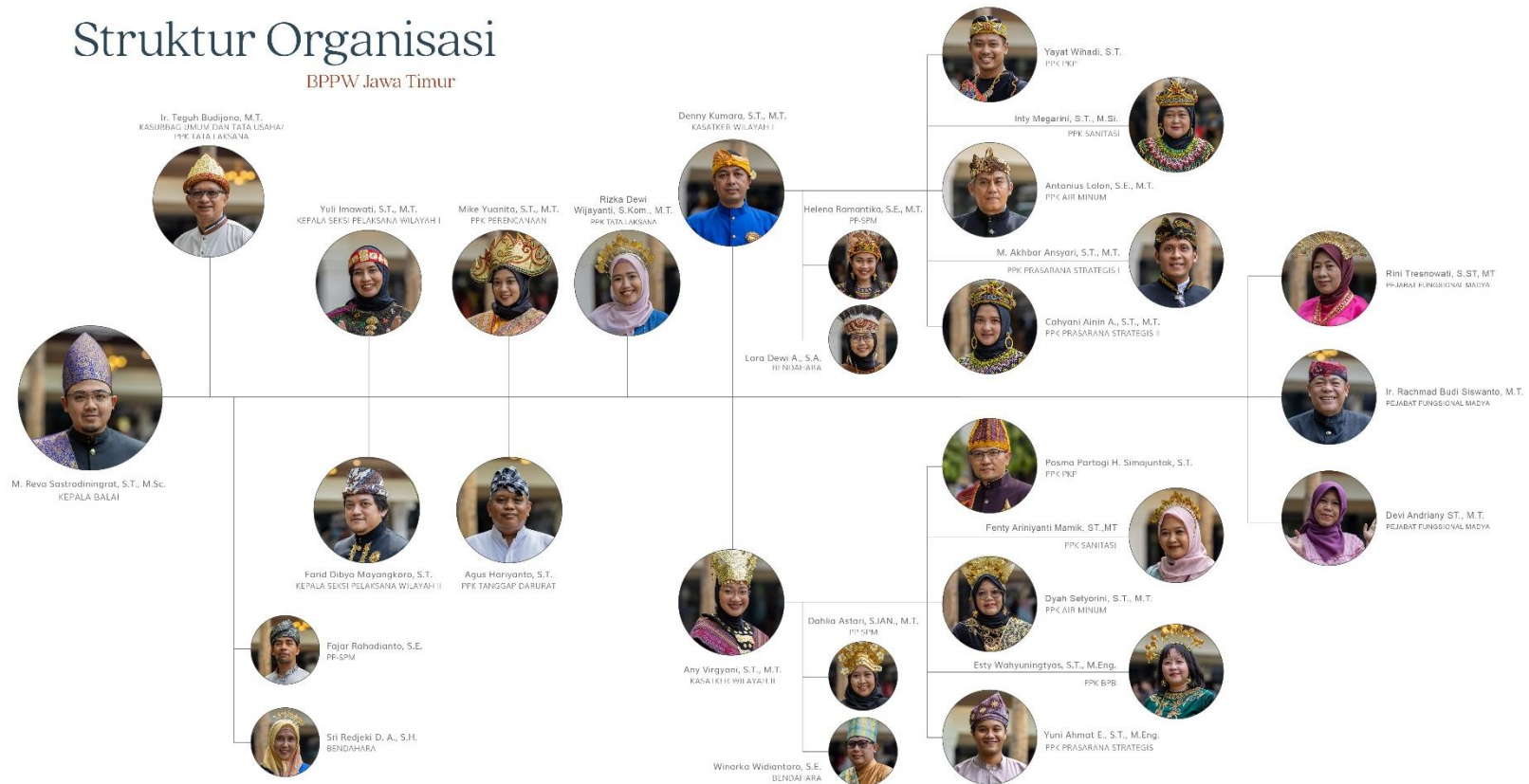
Sebelum perang, ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaan pemerintahan di Hindia Belanda, mereka datang mengikuti Tentara Sekutu masuk ke Indonesia. Keinginan Pemerintahan Belanda tersebut menimbulkan konflik fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air dan bangunan yang mereka tempati, antara lain “Gedung Sate” yang saat itu telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum, peristiwa bersejarah ini dikenal dengan peristiwa “3 Desember 1945”.

1.4.2 Struktur Organisasi

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur (BPPW Jatim) dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang mengepalai seluruh satuan kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur. Berikut ini struktur organisasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur :

Struktur Organisasi

BPPW Jawa Timur



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur

(Sumber: BPPW Jatim, 2024)